

# ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN SIGI

**Diana Arianti**

*diana.arianti@yahoo.co.id*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*Administration of regional property is component in asset management that has important role in local financial statements. According to the law of the Ministry of Demostic Affairs number 17 year 2007 about technical guidance of regional property management, property administration is divided into three activities that are accounting, inventory, and reporting. The Department of Regional Revenue and Asset Administration in Sigi Regency has not effectively managed its property for three reasons : 1) lack of competence of human resources due to lack of training and job rotation; 2) lack of infrastructure of 46 governmental working units in Sigi, only 7 units have storage warehouses because their effices are still renting. In addition, lack of maintanence; 3) System, functions and duties of property administration averlap, the role of the administrator is overlooked because the distribution of property is directly to the working units.*

**Keywords:** *administration, asset, administrator, management, and BMD*

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008, memperlihatkan bahwa peraturan tersebut memberikan landasan yang kuat dalam mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 diharapkan Pengelolaan dan Pengadministrasian BMN/D semakin tertib dan baik sehingga di masa mendatang dapat lebih efektif.

Penatausahaan barang milik daerah tidak lepas dari pengelolaan barang milik daerah dimana penatausahaan barang merupakan komponen/bagian dari pengelolaan barang itu sendiri. Permasalahan yang timbul terkait dengan pengelolaan barang milik negara/daerah, permasalahan tersebut tidak hanya dialami oleh pemeritah pusat akan tetapi di tingkat daerah juga terkait dengan pengelolaan aset daerah, khususnya di kabupaten sigi. Salah

satu peraturan yang menjadi dasar terhadap penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Sigi adalah peraturan daerah kabupaten sigi nomor 5 tahun 2010, Pemendagri 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008.

Permasalahan dalam penatausahaan barang/aset pada Pemerintah Kabupaten Sigi tidak hanya di pengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan akan tetapi juga dipengaruhi karena banyaknya aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang belum masuk dalam data inventaris. Namun dalam penerapannya, terjadi fenomena dalam penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Sigi yaitu Pada tahun 2014, terdapat barang milik daerah Kabupaten Sigi yang belum tercatat dalam data inventaris Kabupaten Sigi dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, masih ada barang milik daerah dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), yaitu barang yang rusak sudah dimasukkan sebagai aset lain-lain namun

untuk pembukuan barang tersebut masih tercatat sebagai barang inventaris dan belum dihapuskan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, tidak adanya sarana-prasarana yang mendukung pengurus barang dalam melakukan penatausahaan barang. Yang menjadi dasar pemerintah untuk mengefektifkan penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Sigi adalah Hasil Opini BPK pada tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu wajar dengan pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, yang menjadi permasalahan adalah kurang tertibnya pengelolaan aset di Kabupaten Sigi sehingga berdampak pada Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan serta fenomena yang berkaitan tentang penelitian ini, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mendeskripsikan penatausahaan dalam Pembukuan barang milik daerah di Kabupaten Sigi ?
2. Bagaimana mendeskripsikan penatausahaan dalam Inventarisasi barang milik daerah di Kabupaten Sigi ?
3. Bagaimana mendeskripsikan Penatausahaan dalam Pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Sigi ?

Beberapa hasil Penelitian terdahulu yang dalam penelitian ini di jadikan sebagai acuan atau rujukan dan pengembangan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

### Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rasyidah (2012) Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang	Variabel penelitian yaitu penatausahaan barang/aset	Metode penelitian yaitu Metode Kuantitatif dan Lokasi penelitian
2.	Franki Ferdianus U (2013) Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah provinsi maluku)	Variabel Penelitian yaitu penatausahaan barang/aset tetap dan Metode penelitian yang sama yaitu Kualitatif	Lokasi Penelitian
4.	Hasfi Nyemas, (2013) Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sub Variabel Penelitian yaitu penatausahaan barang dan Metode penelitian yang sama yaitu Kualitatif	Lokasi Penelitian dan Variabel penelitian yaitu Pengelolaan aset
5.	Asmara Wana Lago (2014) Pengaruh pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Vertikal di Wilayah Kerja KPPN Palu	Sub Variabel Penelitian yaitu penatausahaan barang	Lokasi Penelitian, Metode penelitian yang berbeda yaitu Metode Kuantitatif dan Variabel penelitian yaitu Pengelolaan Barang/Aset Negara

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyidah (2012), Penelitian ini dilatar belakangi ketidak tertiban dalam pelaksanaan prosedur penatausahaan aset/barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset - aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Adanya indikasi belum optimalnya penatausahaan aset/barang milik daerah, berpengaruh terhadap keakuratan nilai aset di neraca pemerintah daerah, padahal keakuratan nilai aset ini sangat mendukung dalam pemberian opini BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Padang terhadap penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2007 dan kendala dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmah Fairoza KH (2013), Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, harapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang dengan cara menyediakan bidang khusus penatausahaan di DPKA Kota Padang. Bagi Pemko Padang, diharapkan adanya upaya untuk mensosialisasikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada

DPKA supaya mudah melaksanakan penatausahaan dan akuntansi aset. Bagi masyarakat diharapkan adanya partisipasi berupa penilaian baik atau buruk kinerja pemerintah. Dimana fenomena yang terjadi di pemerintah kota padang yaitu aset – aset Pemkot masih belum terkoordinir dengan baik. Masih banyak barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga nantinya akan menghasilkan data yang tepat dan akurat. Berdasarkan audit BPK RI, empat tahun terakhir Pemko Padang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan salah satu pengecualiannya adalah pengelolaan aset tetap. Selain itu, para pengelola barang belum memiliki kemampuan tentang tata cara penanganan barang hilang, penyusutan barang daerah serta kode - kode dalam inventarisasi penelitian yang dilakukan oleh Ferdianus Franki U (2013), Penelitian ini membahas penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Maluku. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala-kendala penatausahaan aset tetap yang dihadapi pengurus barang dan mengetahui pengaruhnya terhadap data Laporan Barang Milik Daerah yang valid. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Skala Likert dan studi kasus untuk mendalami inkuiri secara empiris kendala-kendala yang dihadapi pengurus barang dalam proses penatausahaan aset tetap dan pengaruh kendala-kendala tersebut terhadap data Laporan Barang Milik Daerah yang valid dalam neraca keuangan daerah. Hasil penelitian berdasarkan alat analisis Skala Likert menunjukkan bahwa, kendala-kendala yang diidentifikasi dalam penatausahaan aset tetap oleh pengurus barang yaitu pembukuan meliputi kegiatan pencatatan KIB, penyesuaian KIR terhadap KIB, penyesuaian dengan aspek akuntansi (rekon) dan membuat Daftar BMD Pengguna. Inventarisasi meliputi kegiatan sensus BMD, pengecekan bukti yuridis dan

fisik, pengecekan dan pengklasifikasian barang hilang/rusak, musnah, dihapus, teknik inventarisasi. Pelaporan meliputi pelaporan secara berjenjang sesuai periode waktunya, pembuatan catatan/penjelasan atas keadaan dalam Laporan BMD dan alokasi waktu penyusunan Laporan BMD. Berdasarkan analisis studi kasus, kendala-kendala penatausahaan aset tetap berpengaruh karena kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan yang saling bertalian, bukti konkretnya berupa opini disclaimer BPK RI terhadap aset tetap Pemerintah Provinsi Maluku sampai saat ini.

Penelitian lain dilakukan Hasfi Nyemas (2013), peneliti mengemukakan fokus penelitiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan Wana Asmara Lago (2014), Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Vertikal yang berada di Wilayah Kerja KPPN Palu khususnya kepada Pengelola Barang Dan Operator Sistem Akuntansi Dan Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN) yang mengetahui dan mengelola aset/barang milik negara yang bersumber dari APBN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Negara yang terdiri dari Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penilaian, Pemindahtanganan dan Penatausahaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam Pengelolaan Barang Milik Negara untuk menunjang dan menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada 68 pengelola barang dan operator SIMAK-BMN dari 34 Satuan kerja Vertikal di wilayah Kerja KPPN Palu. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan maupun parsial 4 (Empat) variabel Pengelolaan Barang Milik Negara berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dari keempat variabel tersebut Pemindahtanganan lebih dominan dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada satuan kerja vertikal di wilayah Kerja KPPN Palu.

Jurnal yang berjudul: "Pelatihan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah". Menjelaskan bahwa dalam Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis. H Sulistianto mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar laporan

keuangan Pemkab Langkat menuju *Good Government*. Aplikasi Simda merupakan langkah penting untuk mendapatkan data yang benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Harapan H.Sulistianto dilaksanakannya pelatihan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, kita akan dapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar dapat menyikapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, sehingga penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah akan baik dan benar pada akhirnya. Karena laporan keuangan salah satunya adalah menyangkut pengelolaan aset barang milik daerah, untuk kesemuanya ini sangat penting peran dari SKPD masing-masing.

**METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Kabupaten Sig yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sigi. Dari hasil penelitian tersebut kemudian diuraikan secara kualitatif untuk menjelaskan dalam bentuk narasi hasil wawancara yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sigi.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian, berkenaan proses penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sigi seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel. 3.1. Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah	Nama	Tanggal
1.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sigi	1 orang	Drs. H. Endro Setiawan	(tidak diwawancara)
2.	Kabid Akuntansi dan Pengelolaan	1 orang	Rolland Franklin, S.SP,	15 Sept 2016 19 Sept 2016

	Aset Daerah		M.Si	
3.	Kasi Pelaporan, Pengawasan dan Investaris	1 orang	Nancy Ainun, S.STP, M.Si	3 oktober 2016
4	Staf bidang aset dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Sigi	orang	Hary Setiawan	5 oktober 2016
	Total	4 orang		

Adapun yang dijadikan *key informan* dalam penelitian, berkenaan proses penatausahaan barang milik daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Sigi adalah Kepala Bidang Keuangan dan Aset, Kepala Seksi Pelaporan, Pengawasan dan Inventaris serta Staf Bidang Aset dan Pemegang Buku.

Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono, (2013). Operasional variabel yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
2. Pengadaan adalah kegiatan yang untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
3. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

- Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

### Teknik Pengumpulan Data

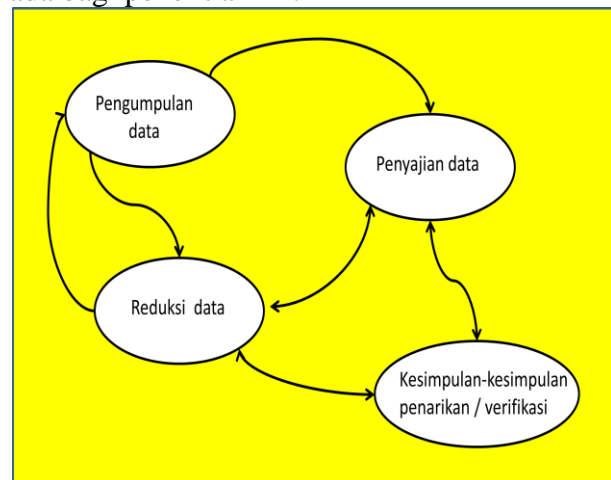
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- Survei, yaitu kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti keadaan yang ada di lokasi penelitian. Kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan rumusan masalah penelitian menjadi lebih fokus.
- Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang penatausahaan, antara lain: Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Barang Milik Daerah, Kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi, dan lain-lain.
- Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Asset, regulasi-regulasi pemerintah tentang Barang Milik Daerah, membuka website yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah, karya-karya ilmiah yang mendukung penelitian ini, serta literatur lainnya.
- Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan para informan untuk memperoleh data lebih akurat yang akan digunakan dalam menganalisa penatausahaan barang milik daerah. Dalam penelitian ini wawancara terbatas kepada orang-orang yang berkompeten/ahli dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara standaratis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan menggunakan *interactive model of analysis* (analisis model interaktif) yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann. Pada model interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponenyaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* yaitu terdiri dari tahap penarikan dan verifikasi (Miles dan Hubermann, 1992). Dengan model ini menganjurkan peneliti tetap untuk selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini.



Sumber : Miles dan Hubermann (1992)

Gambar Analisis model interaktif

#### 1) Reduksi Data

Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang terinci dan lengkap, dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan

dalam reduksi data ini berarti suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2) Penyajian Data atau *Display Data*

Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. Penyajian data atau *display data* dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

## 3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Analisis disusun dan diarahkan pada focus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penatausahaan barang milik daerah adalah merupakan suatu komponen yang terdapat dalam pengelolaan aset yang berperan penting dalam menyajikan suatu laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset Daerah bapak Roland Franklin. S.STP., M.Si, menurut informan menjelaskan bahwa :

*“ penatausahaan barang milik daerah di kabupaten sigi, dalam pelaksanaannya bila dilihat dari semua SKPD yang berada diwilayah kabupaten sigi belum dapat dikatakan efektif disebabkan oleh karena kurangnya sumber daya manusia yang tidak memadai, contoh halnya pada dinas pendidikan dimana pada dinas pendidikan terdapat barang/aset daerah yang cukup banyak akan tetapi dalam pengelolaannya hanya diurus/ dikelola oleh 1(satu) orang pengurus barang saja, sehingga tidak efektif, hal tersebut dikatakan tidak efektif disebabkan karena dari sekian jumlah bangunan sekolah yang ada diwilayah kabupaten sigi dan barang/aset milik dinas pendidikan hanya dikoordinir 1 (satu) pengurus barang “ ( Wawancara tanggal 15 September 2016 )*

Dalam melakukan penatausahaan barang tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola aset yang profesional dan handal untuk melakukan penatausahaan. Seluruh pejabat pengelola barang/aset milik daerah, harus bersungguh-sungguh dalam melakukan pemantauan atau pengawasan intern terhadap barang/aset daerah khususnya dalam hal menyimpan dan memelihara barang/aset daerah tersebut. Selain itu juga yang dimaksud oleh informan mengenai sumber daya manusia yang tidak memadai yaitu dimana sebagai pengurus barang tidak didukung dengan standar pendidikan, pengalaman sebagai pengurus barang dan tidak melalui pelatihan/bimtek. Ditambah lagi sarana-prasarana yang tidak mendukung bagi pengurus barang, adapun sarana-prasarana yang dimaksud yaitu dimana pengurus barang tidak pernah dianggarkan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pengurus barang seperti: laptop, kendaraan roda dua, meteran (alat ukur), dan lain-lain juga gudang tempat penyimpanan aset. Persoalan paling utama yang dikemukakan oleh bapak Roland Franklin. S.STP., M.Si adalah rotasi, dimana pengurus barang setiap tahunnya diganti oleh Kepala SKPD sesuai keinginan Kepala SKPD itu sendiri. Selain itu juga yang menjadi dasar dari pernyataan kepala

bidang keuangan dan aset kabupaten sigi yang menyatakan bahwa penatausahaan barang kabupaten sigi belum efektif adalah hasil Audit BPK. Dimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyatakan bahwa ada 3 (tiga) indikator permasalahan dalam pengelola barang yang menyebabkan penatausahaan barang belum efektif yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pemantauan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Permasalahan yang paling utama dari ketiga (3) indikator tersebut yaitu pertama perencanaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Perencanaan yang dimaksud khusus kaitannya dengan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana-Prasarana, dan Penganggaran. Dari ketiga hal tersebut dijelaskan bahwa dalam Perencanaan anggaran, kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM), Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tidak pernah menganggarkan bagi pengurus barang untuk mengikuti pelatihan/bimtek. Perencanaan anggaran, kaitannya dengan Sarana-prasarana, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tidak pernah menganggarkan kebutuhan bagi pengurus barang seperti laptop, kendaraan, gudang tempat penyimpanan aset dan lain-lain.

Bapak Roland Franklyn. SSTP sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Aset menjelaskan beberapa contoh penatausahaan barang yang belum efektif sebagai berikut :

*“Dilihat dari tiga faktor permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten sigi seperti pada puskesmas bampers kecamatan palolo dimana didalam pemeriksaan BPK, pengurus barang tidak membuat laporan barangnya disebabkan tidak adanya sarana-prasaran seperti pengadaan laptop bagi pengurus barang sehingga dalam menyusun laporan barang harus meminjam kepada pegawai lain yang mempunyai laptop ..... SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dimana pengurus barang tidak menyusun atau membuat laporan barang dikarenakan sumber daya manusianya dalam hal ini pengurus barang tidak tahu cara*

*membuat laporan untuk dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....” (wawancara tanggal 15 september 2016).*

Permasalahan yang kedua terkait dengan pelaksanaan yaitu pengurus barang tidak melaksanakan tugas/fungsinya sebagai pengurus barang disebabkan karena tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana-prasarana dalam melaksanakan penatausahaan barang, masih ada pengurus barang yang belum paham dengan tugas-tugasnya yaitu: bagaimana membuat pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman/ pengetahuan pengurus barang tentang pengelolaan barang/aset daerah sehingga dalam penatausahaan khususnya membuat pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang melaksanakan atau melakukan adalah kepala seksi keuangan dan aset, ditambah lagi tidak adanya dukungan fasilitas untuk mengerjakan penatausahaan seperti labtop dan gudang untuk tempat menyimpan barang/aset. Adanya pengadaan labtop, gudang dan lain-lain memudahkan pengurus barang untuk mengkoordinir dan melakukan inventarisasi serta memudahkan pengurus barang untuk menyusun sebuah laporan barang yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Permasalahan yang ketiga adalah pengawasan/pemantauan dimana kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak pernah melakukan pengawasan/pemantauan terhadap pengurus barang, apakah pengurus sudah melaksanakan tugasnya sebagai pengurus barang atau belum dan ditambah lagi pengurus barang juga tidak pernah melakukan pengawasan/pemantauan terhadap barang/aset seperti pemeliharaan dan pengamanan. Permasalahan ketiga ini terkait dengan penatausahaan yaitu dimana pengurus barang tidak melakukan inventarisasi terhadap barang/aset dengan baik seperti : melakukan perhitungan, pencatatan berapa jumlah aset yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), kondisi barang/aset tersebut, dan lain-



lain. Pengurus barang tidak pernah melakukan pemantauan/pengawasan terhadap barang/aset karena tidak didukung sarana-prasarana seperti pengadaan gudang, kendaraan roda dua (motor).

Berdasarkan wawancara dengan staf bidang keuangan dan aset, bapak Hari Setyawan, staf bidang akuntansi dan aset menurut informan menjelaskan bahwa :

*“..... penatausahaan dikatakan belum bagus karena masih banyak SKPD yang belum memiliki gudang tempat penyimpanan barang/aset sehingga dalam menginventarisasi barang/aset seperti pengurusan, pendataan dan perhitungan tidak efektif atau belum baik karena terdapat barang/aset yang disimpan ditempat yang tidak selayaknya dan tanpa adanya pengamanan dan pemeliharaan “. (wawancara pada tanggal 5 Oktober 2016)*

Hasil pengamatan dilapangan sangat terkait dengan pernyataan informan yakni dari perencanaan penganggaran untuk sarana-prasaran khusus pengadaan bangunan gudang tempat penyimpanan barang/aset, dari empat puluh dua (42) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Sigi, hanya 7 (tujuh) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki gudang tempat penyimpanan barang/aset, sehingga Tigapuluh lima (35) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) belum memiliki gudang penyimpanan barang/aset. Dari ke 7 (tujuh) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki gudang dimaksud adalah :

1. Gudang milik Dinas Kesehatan
2. Gudang milik Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD)
3. Gedung milik Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
4. Gudang milik Sekretariat Daerah
5. Gudang milik Perusahaan Umum (PERUM)
6. Gudang milik Dinas Pekerjaan Umum (PU)
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD),

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah memiliki gudang tempat penyimpanan barang/aset. Sedangkan

Tigapuluh lima (35) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) belum memiliki gudang penyimpanan barang/aset disebabkan karena memiliki kantor sendiri, hanya meminjam.

Selain itu juga hasil wawancara dengan informan, mengenai jumlah pengelola barang yang ada di tiap-tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), menyatakan hal yang serupa dengan yang diungkapkan oleh informan sebelumnya yaitu Kepala Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset Daerah bapak Roland Franklin. S.STP.,M.Si menyatakan bahwa :

*“ Jumlah pengelola barang/aset yang ada di setiap SKPD tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan, dimana ada SKPD yang memiliki jumlah barang/aset sedikit tapi mempunyai pengelola barang 2 (dua) orang sementara SKPD yang memiliki jumlah aset banyak hanya mempunyai 1(satu) pengelola barang saja”. (wawancara tanggal 19 september 2016).*

Tidak sesuai penempatan pengelola barang/aset di setiap SKPD akan berpengaruh terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah, karena tidak seimbang volume pekerjaan yang dimiliki oleh seorang pengurus barang / pengelola barang pada setiap SKPD akan menjadi hambatan dalam proses penatausahaan itu sendiri. Karena kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola barang adalah barang daerah yang telah disensus dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, dimana rekap buku inventaris ini selanjutnya oleh pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya Membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.

Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:

1.Laporan Mutasi Barang; dan  
2.Daftar Mutasi Barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelaporan, Pengawasan dan Inventaris DPPKAD Kabupaten Sigi, ibu Nancy Ainun, S.STP menyatakan bahwa:

*“yang menjadi kendala dalam melakukan penatausahaan barang adalah kurangnya pengetahuan/pemahaman bagi pengurus barang terhadap penatausahaan barang seperti bagaimana melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dimana masih ada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bagi pengurus barangnya tidak melakukan inventarisasi barang dengan baik seperti barang/aset dibiarkan begitu saja tanpa ada pemeriharaan dan pengawasan terhadap barang tersebut.”(wawancara tanggal 3 oktober 2016).*

Salah satu kelemahan dalam penatausahaan di Kabupaten Sigi adalah Sumber Daya Manusia atau staf yang mengurus barang milik daerah pada setiap SKPD di Kabupaten Sigi, masih minimnya pengetahuan para pengurus barang, Bendahara Barang dan Pengelola Barang yang mengakibatkan mekanisme ataupun alur dari penatausahaan tidak optimal, seperti pembukuan dalam hal pemberian pengkodean setiap barang, banyak petugas di setiap SKPD tidak memahami hal tersebut, karena petugas penatausahaan pada SKPD yang bertugas belum pernah mengikut pelatihan atau bimbingan teknis tentang penatausahaan barang milik daerah.

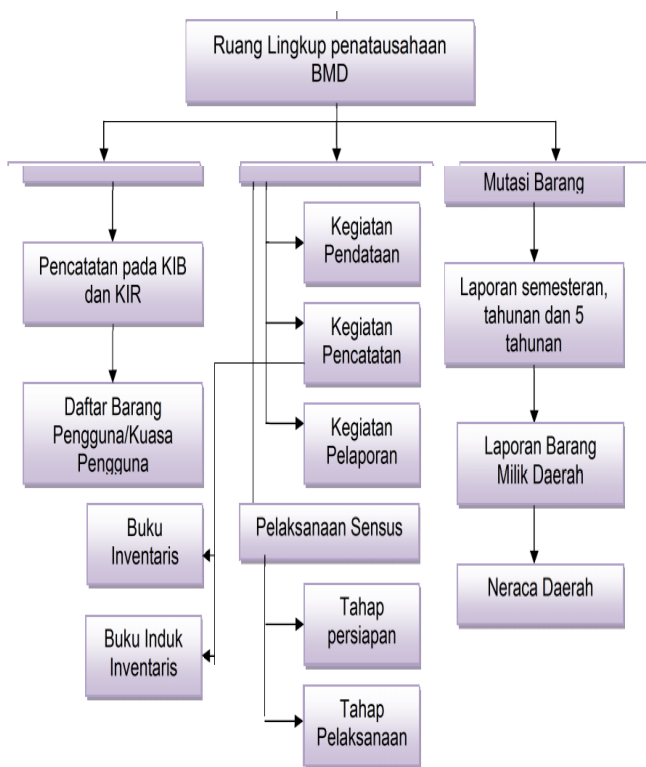
Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku

inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

- a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
- b. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
- c. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. pembiayaan; dan
13. tuntutan ganti rugi.



sumber : Permendagri Nomor 17 tahun 2007 diolah

**Gambar 5. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah**

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyusunan artikel ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Syamsul Bachri ,SE, MSi dan Anggota Tim Pembimbing. Dr. Abdul Kahar, SE, M.Si.,Ak.,C.A dan Dr. Vita Fattah, SE, M,Si Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

**DAFTAR RUJUKAN**

Asmara Wana Lago, 2014, *Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja Vertikal di wilayah*

*kerja KPPN Palu. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu*

Ferdianus Franki U, 2013, *Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (Studi pada pemerintah provinsi maluku).Tesis. Program Studi S2 Magister Ek.Pembangunan UGM*

Hilmah Fairiza KH, 2013, *Analisis pelaksanaan dan akuntansi aset tetap pada DPKAD kota padang. Tesis. Program studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.*

Hasfi Nyemas, 2013, *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang).Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal Untan.Vol.1*  
 No.0001(2013)/E11211083,<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/2507>. Diaksestanggal 24 Febuari. Hal 1.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development, Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta*

Rasyidah, 2012, *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang*

Siregar, 2004, *Manajemen Aset. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.*

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung.*

Sugiama A Gima, 2013, *Manajemen Aset Pariwisata, Bandung.*

William Einstein Evans Tulungen, *Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.2, No.3, 2014:71-86Wednesday 2014.*